

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang dalam keberlangsungan hidupnya akan selalu berinteraksi dengan individu lain atau dapat disebut dengan interaksi sosial. Seperti tolong menolong, gotong royong, jual beli, dan hubungan lainnya. Indonesia merupakan sebuah negara yang multikultural yaitu negara yang memiliki berbagai macam etnis, budaya, dan agama. Indonesia adalah sebuah bangsa yang mejemuk dari segi ras, bahasa, agama, aliran kepercayaan, adat istiadat, kultur daerah, serta pandangan hidupnya (Ahmad Syahid, 2013). Berdasarkan kutipan tersebut dapat dicermati bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang memiliki berbagai macam keanekaragaman dari setiap aspeknya yang tak bisa lepas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu kemajemukan bangsa Indonesia dapat dilihat dan ditunjukkan dengan adanya keragaman masyarakat dari status sosial, tingkat ekonomi, dan latar belakang pendidikan.

Berbagai macam keanekaragaman yang dimiliki menjadi indikasi bahwa Indonesia merupakan bangsa dengan tingkat pluralitas yang tinggi. Naim (2016) mengatakan perbedaan berbagai aspek agama, budaya, suku, ras, golongan dan berbagai bentuk keanekaragaman yang lainnya menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan dari kehidupan bangsa Indonesia. Dari yang diuraikan oleh Naim, dapat dipahami bahwa perbedaan yang terdapat di dalam bangsa Indonesia merupakan anugerah yang diberikan oleh Tuhan YME dan menjadi suatu keistimewaan bagi bangsa ini. Hal ini tentu menjadi amanah bagi berbagai lapisan warga negara Indonesia untuk menjaga dan merawat berbagai macam keanekaragaman yang ada, baik itu dari pihak pemerintahan yang memiliki hak dan wewenangnya dalam mengatur dan menata negara atau pun bagi rakyat yang menjadi bagian terpenting dalam kehidupan bangsa Indonesia. Berkaitan dengan hakikat manusia sebagai makhluk sosial, tentu hal ini harus benar-benar diperhatikan, sebab dengan berbagai macam keanekaragaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia dapat berpengaruh terhadap proses interaksi sosial. Dengan kemajemukan bangsa Indonesia, proses interaksi sosial antar warga negara yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda

pun akan terjadi, dari interaksi yang terjadi ini dapat menimbulkan berbagai persoalan yang akan berpengaruh terhadap keberlangsungan hidup bangsa Indonesia.

Proses interaksi sosial yang terjadi dalam keanekaragaman bangsa Indonesia akan menghasilkan dua kemungkinan yaitu dampak positif dan negatif, dengan kemajemukan bangsa Indonesia dampak positif yang dihasilkan dari interaksi sosial yaitu sebagai bangsa yang memiliki berbagai keanekaragaman atau multikultural, maka dibutuhkan strategi yang tepat untuk mengelola berbagai keanekaragaman yang ada. Keanekaragaman yang dikelola secara bijak, cerdas dan jujur akan menjadi suatu kekayaan kultural yang hebat (Naim, 2016). Artinya apabila keanekaragaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia dapat dikendalikan oleh pihak-pihak yang terkait dengan baik tanpa merugikan pihak mana pun juga tanpa mengedepankan kepentingan suatu pihak dan hanya berlandaskan untuk kedamaian, ketentraman, keharmonisan serta kemajuan bangsa, maka keanekaragaman ini akan menjadi suatu kekuatan besar dan akan menjadi suatu kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Sedangkan menurut Ma'arif (2009) kekayaan kultural harus dibela dan diperjuangkan dengan sungguh-sungguh, sabar, dan lapang dada. Berdasarkan kutipan tersebut dapat dipahami bahwa dalam mengelola berbagai macam keanekaragaman itu dibutuhkan suatu perjuangan, banyak tantangan, halangan dan rintangan dalam mengelola keanekaragaman yang harus dihadapi oleh bangsa ini. Tentu tidak mudah mengelola keanekaragaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sebagai negara terbesar di Asia Tenggara dan sebagai negara kepulauan menjadi suatu tantangan tersendiri dalam mengelola keanekaragaman yang dimiliki. Oleh karena itu, dalam mengelola keanekaragaman diperlukan kesungguhan, keseriusan, keuletan dan kerjasama yang kuat dari berbagai lapisan warga negara Indonesia serta diperlukan strategi yang tepat. Apabila strategi yang digunakan untuk mengelola keanekaragaman efektif dan efisien serta berbagai pihak saling bersinergi bekerjasama untuk membangun bangsa, maka keanekaragaman ini akan menjadi suatu kekuatan serta akan menjadi suatu keindahan dalam keanekaragaman yang harmonis. Berbagai macam hal positif tentang keanekaragaman dapat menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan

bangsa sebagai modal yang amat berharga bagi bangsa untuk menghadapi berbagai tantangan di era globalisasi.

Dampak negatifnya dari interaksi sosial di negara Indonesia yang mejemuk adalah bisa menjadi pemicu dari berbagai persoalan multidimensi. Persoalan multidimensi yang sering kali terjadi di Indonesia yaitu persoalan yang berbau SARA, persoalan ini seakan menjadi persoalan yang paling sensitif sebab banyak sekali kasus berkaitan dengan SARA terjadi di negeri ini. Begitu banyak catatan minor bangsa ini yang berkaitan dengan SARA, sering kali terjadi konflik benturan antar kelompok yang berbeda suku, ras, dan agama.

Studi yang dilakukan oleh *Centre of Strategic and International Studies* pada tahun 2012, menyatakan bahwa toleransi beragama orang Indonesia tergolong rendah. Dalam survey CSIS, sebanyak 59,9 persen responden keberatan bertetangga dengan orang yang berbeda agama. Sekitar 33,7 persen lainnya menjawab keberatan jika harus bertetangga dengan orang yang berbeda agama. Penelitian ini dilakukan Februari 2012 di 23 provinsi dan melibatkan 2.213 responden. Ketika diberi pertanyaan mengenai pembangunan rumah ibadah agama lain disekitar lingkungannya, sebanyak 68,2 persen responden menyatakan bahwa hal tersebut lebih baik tidak dilakukan. Hanya 22,1 persen yang bersedia. Dalam riset yang dilakukan oleh CSIS ini pun menemukan bahwa latar belakang pendidikan tidak mempengaruhi perilaku intoleransi, data yang ditemukan hanya 20 persen masyarakat yang berpendidikan sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas yang menyatakan tak keberatan dengan adanya pembangunan rumah ibadah agama lain. Masyarakat yang berpendidikan diatas SMA yang setuju dengan hal tersebut pun hanya sekitar 38,1 persen. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan seseorang kurang begitu berpengaruh terhadap perilaku toleransi.

Menurut laporan dari The Wahid Institute tentang kasus pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan serta intoleransi di Indonesia pada tahun 2013 yang mencapai 245 peristiwa dan pada tahun 2014 mencapai 154 peristiwa atau turun 40 persen dengan kasus yang terjadi 55 peristiwa yaitu dengan DI Yogyakarta dengan 21 peristiwa, Sumatera Utara dengan 18 peristiwa, DKI Jakarta

dengan 14 peristiwa, Jawa Tengah dengan 10 peristiwa, dan Sulawesi Selatan dengan 10 peristiwa.

Sementara itu hasil survei dari SETARA Institute tentang kondisi kebebasan beragama/berkeyakinan dan minoritas keagamaan yang dilakukan pada tahun 2018 menunjukkan sebanyak 109 peristiwa kasus pelanggaran dengan 136 tindakan yang tersebar di 20 provinsi. Sebagian besar kasus pelanggaran terjadi di DKI Jakarta dengan 23 peristiwa, di peringkat kedua Jawa Barat dengan 19 peristiwa, di posisi ketiga Jawa Timur dengan 15 peristiwa, di posisi keempat DI Yogyakarta dengan 9 peristiwa, dan NTB di posisi kelima dengan 7 peristiwa. Itulah posisi lima besar kota dengan tingkat peristiwa kasus pelanggaran terbanyak. Tindakan pelanggaran yang terjadi berupa intoleransi, diskriminasi, intimidasi, provokasi, penodaan agama, teror, kekerasan, dan ujaran kebencian. Data yang ditemukan oleh SETARA Institute juga menunjukkan bahwa tingkat kasus pelanggaran mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, pada tahun 2017 terjadi 80 peristiwa dengan 99 tindakan, artinya pada tahun 2018 terjadi kenaikan sebanyak 20 peristiwa dan 37 tindakan. Peningkatan kasus pelanggaran pada tahun 2018 diakibatkan oleh beberapa faktor pokok. Pertama, faktor politik. Kedua, peningkatan intoleransi pada level individu dan kelompok warga. Ketiga, Kompleksitas pasal penodaan agama. Keempat, *problem digital illiteracy* dalam instrumentasi media sosial dan dunia maya oleh warganet. Kelima, kebangkitan kelompok kontra narasi radikalisme, ekstrimisme kekerasan, terorisme, dan anti Pancasila.

Survey terbaru yang dilakukan oleh Wahid Institute (dalam Antara, 2020) pada tahun 2020 menunjukkan bahwa kasus intoleransi dan radikalisme di Indonesia cenderung meningkat dari waktu ke waktu. Hasil kajiannya terdapat sekitar 0,4 persen atau sekitar 600.000 jiwa warga negara Indonesia yang pernah melakukan tindakan radikal. Adapun kelompok masyarakat yang rawan terpengaruh gerakan radikal, yaitu mereka yang bisa melakukan tindakan radikal jika diajak atau jika ada kesempatan dengan jumlah 11,4 juta jiwa atau 7,1 persen. Sementara perilaku intoleransi di Indonesia cenderung meningkat dari sebelumnya sekitar 46 persen dan saat ini terjadi 54 persen.

Apabila digali lebih dalam dan ditelusuri lebih lanjut, konflik SARA yang terjadi diberbagai daerah di Indonesia kebanyakan disebabkan oleh kurangnya rasa

saling menghargai dan memahami serta toleransi satu sama lain antar kelompok yang berbeda. Seluruh persoalan konflik mengenai SARA tersebut tentu tidak bisa dibiarkan dan diabaikan begitu saja, karena persoalan tersebut bukanlah persoalan kecil yang apabila dibiarkan dan diabaikan akan mengganggu keamanan bangsa dan luntarnya jati diri bangsa Indonesia, hal tersebut tentunya tidak sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia yang sesungguhnya seperti ramah, gotong royong, tenggang rasa, dan toleran. Dalam realitas kehidupan plural seperti Indonesia yang terpenting yaitu menjunjung tinggi nilai-nilai pluralitas universal agar tercipta kehidupan yang harmonis (Ambarudin, 2016). Dari pernyataan yang dikemukakan oleh Ambarudin dapat dicermati bahwa sebagai bangsa yang multikultural, bangsa Indonesia harus memiliki rasa saling menghargai, menghormati dan toleransi antar kelompok masyarakat yang memiliki beragam karakteristik yang berbeda. Karena rasa saling menghargai, menghormati dan toleransi merupakan suatu karakteristik yang harus dimiliki oleh bangsa Indonesia agar terjalin hubungan yang harmonis antar warga negara dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Berdasarkan nilai karakter budaya bangsa, dalam persoalan tersebut perilaku toleransi merupakan hal yang harus digaris bawahi. Perilaku toleransi merupakan salah satu karakter bangsa yang harus digencarkan kembali untuk mencegah persoalan konflik SARA. H.A.R Tilaar (2002) mengemukakan bahwa wajah Indonesia yang Bhineka menuntut sikap toleran yang tinggi dari setiap anggota masyarakat. Artinya dalam kehidupan bangsa Indonesia yang memiliki karakteristik berbeda-beda, maka sudah menjadi kewajiban setiap warganya untuk saling bertoleransi. Toleransi menjadi faktor utama bagi bangsa ini untuk menghindari konflik yang berkaitan dengan keberagaman dan agar terciptanya ketentraman dalam kehidupan bangsa Indonesia. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengencarkan kembali perilaku toleransi yaitu dengan memaksimalkan berbagai aspek yang ada, salah satu aspek yang paling penting dan berpengaruh adalah pendidikan. Kehidupan sosial dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia akan terjaga dengan baik apabila tumbuh semangat bertoleransi secara luas dari seluruh lapisan masyarakat. Sikap toleransi harus diwujudkan oleh setiap anggota dan lapisan masyarakat agar dapat terciptanya kerukunan dalam kehidupan barbangsa dan bernegara sehingga dengan hidup rukun saling berdampingan saling

menghargai dan menghormati satu sama lain maka akan menjadi kekuatan bagi bangsa itu sendiri dalam membangun peradaban yang lebih baik. Oleh karena itu salah satu cara yang jitu yang dapat dilakukan untuk mengembangkan serta membangun perilaku dan sikap toleransi yaitu melalui pendidikan.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional secara jelas mendefinisikan bahwa: Pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Melihat penjabaran definisi pendidikan menurut undang-undang tersebut dapat kita pahami bahwa pendidikan merupakan suatu bagian yang memiliki peran penting dalam mengembangkan potensi serta membentuk perilaku yang baik dan berperan aktif dalam menyebarkan energi positif bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Menurut UU No 20 Tahun 2003 Pasal 3 tentang Fungsi dan Tujuan Pendidikan yaitu Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Ditinjau dari salah satu hasil yang diharapkan dari tujuan pendidikan tersebut yaitu membentuk watak dan peradaban bangsa, toleransi merupakan salah satu watak bangsa yang diharapkan agar terciptanya kerukunan antar masyarakat. Toleransi pun merupakan salah satu jati diri bangsa yang harus dijaga dan dibina, di era globalisasi banyak sekali tantangan yang akan mengusik salah satu jati diri bangsa ini, dengan kemajuan zaman dan semakin berkembang pesatnya teknologi saat ini membuka peluang besar masuknya berbagai budaya asing dan dengan mudahnya memperoleh berbagai macam informasi. Hal tersebut yang dikhawatirkan dapat mempengaruhi dan melunturkan jati diri bangsa Indonesia, seperti sikap atau perilaku individualisme dan intoleransi. Oleh karena itu sikap atau perilaku toleransi perlu dijaga dan dibina sebaik mungkin, berkaitan dengan hal tersebut pendidikan menjadi faktor penting untuk menjaga dan membina perilaku toleransi sejalan dengan fungsi dan tujuan pendidikan untuk membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat.

Melihat dari fungsi dan tujuan pendidikan menurut UU NO. 20 Tahun 2003, dapat kita cermati bahwa pendidikan juga memiliki peran untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme, menambah rasa cinta tanah air, meningkatkan semangat kebangsaan dan mewujudkan kehidupan berkebangsaan yang rukun. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut adalah melalui penanaman dan pembinaan nilai moral. Dalam suatu sistem pendidikan, seorang peserta didik harus memiliki sikap tenggang rasa saling menghargai dan menghormati perbedaan yang ada baik itu perbedaan agama, suku, ras dan budaya. Untuk menjalankan upaya ini diperlukan sarana yang tepat serta efektif dalam pelaksanaannya, salah satu sarana yang tepat adalah melalui jalur pendidikan, lebih khususnya yaitu pendidikan kewarganegaraan. Karena pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu program inti yang bertugas mengembangkan dan meningkatkan mutu martabat manusia dan kehidupan bangsa Indonesia menuju terwujudnya cita-cita nasional (Suharyanto, 2013).

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan salah satu mata pelajaran yang dapat banyak berkontribusi untuk permasalahan sosial-kewarganegaraan. Dalam pencapaian tujuan pendidikan tentunya setiap mata pelajaran di sekolah memiliki wadah pengembangannya masing-masing. Salah satunya adalah Pendidikan Kewarganegaraan yang dalam UU No.20 Tahun 2003 Pasal 37 dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki perilaku toleransi, nasionalisme dan cinta tanah air.

Pendidikan Kewarganegaraan memiliki dasar epistemologis bahwa berupaya agar manusia yang sadar tujuan untuk menumbuhkembangkan potensi individu agar menjadi anggota masyarakat atau warga negara yang dewasa. Sebagai wahana pendidikan karakter, Pendidikan Kewarganegaraan setidaknya berfungsi mengembangkan tiga karakteristik warga Negara yang cerdas dan baik yaitu; *civic intelligence* (kecerdasan warga negara), *civic responsibility* (tanggung jawab warga negara) dan *civic participation* (partisipasi warga Negara).

Dunia pendidikan khususnya sekolah merupakan salah satu tempat bagi anak untuk belajar, berinteraksi dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Di sekolah anak akan berinteraksi dengan individu lain baik itu dengan guru atau dengan teman-temannya yang memiliki karakteristik yang beragam. Sekolah adalah

salah satu tempat yang tepat untuk membina perilaku toleransi peserta didik terutama sekolah dasar. Meskipun berbagai upaya untuk membina perilaku toleransi di sekolah dasar telah dilakukan, namun pada kenyataannya masih banyak kasus intoleransi terjadi di sekolah dasar seperti saling mengejek atau membully teman yang memiliki kekurangan atau teman yang memiliki perbedaan. Menurut Tim Pikiran Rakyat (2019) Komisi Perlindungan Anak (KPAI) menerima 153 pengaduan kasus kekerasan fisik dan psikis kepada siswa di satuan pendidikan sepanjang tahun 2019 dan 153 kasus itu terdiri dari anak korban kebijakan, anak korban kekerasan fisik dan *bullying*. Berdasarkan jenjang pendidikan, 39 persen korban kekerasan fisik dan perundungan terjadi di jenjang SD atau MI, 22 persen terjadi di jenjang SMP/ sederajat dan 39 persen terjadi di jenjang SMA/ sederajat.

Dari beberapa kasus intoleransi yang terjadi di sekolah, hal itu menjadi salah satu dorongan bagi pemerintah dalam membuat dan mengencangkan program pendidikan karakter di sekolah saat ini. Perilaku toleransi akan lebih baik jika dibina sejak dini mulai dari belia agar karakter perilaku toleransi tertanam dan mengakar hingga dewasa dalam diri setiap peserta didik. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa sekitar 50 persen variabilitas kecerdasan orang dewasa sudah terjadi ketika anak berusia 4 tahun. Peningkatan 30 persen berikutnya terjadi pada usia 8 tahun, dan 20 persen sisanya terjadi pada pertengahan atau akhir dasawarsa kedua (Nuh, 2014). Demikian pula menjadi suatu alasan mengapa dalam kurikulum 2013 pengembangan sikap untuk siswa sekolah dasar menjadi perhatian dan kepedulian utama.

Program pendidikan karakter di sekolah yang digencangkan oleh pemerintah, sebagaimana menurut Kemendiknas (2010) merumuskan 18 nilai karakter bangsa Indonesia. Nilai-nilai tersebut yaitu nilai religious, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat/komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. Dari kedelapan belas nilai karakter bangsa yang ada, pembinaan perilaku toleransi di sekolah sangat sesuai dengan nilai-nilai tersebut. Oleh karena itu sekolah harus memiliki strategi yang jitu untuk membina perilaku toleransi bagi peserta didik.

Pendidikan toleransi dalam perspektif Islam tidak dapat dilepaskan dengan konsep pluralitas, sehingga muncul istilah Pendidikan Islam Pluralis-Multikultural (Maksum Ali, 2015). Artinya pendidikan toleransi dalam Islam yang pluralis-multikultural ini berorientasi pada upaya pencegahan terjadinya berbagai kemungkinan konflik yang ada dan telah diatur secara strategis dan sistematis. Mengacu pada hal tersebut salah satu strategi yang dilaksanakan dalam jenjang pendidikan dasar adalah dengan mendirikan sekolah dasar berbasis Keislaman atau biasa disebut dengan sekolah dasar Islam. Ciri khas sekolah dasar Islam ini yaitu sistem pendidikannya yang memadukan antara pendidikan umum dengan pendidikan agama Islam secara khusus, tetapi dalam pengajarannya lebih mengedepankan pendidikan agama Islam, sehingga pendidikan mengenai Keislaman lebih mendominasi.

Tentunya sektor pendidikan secara umum dan khususnya pendidikan kewarganegaraan sangat bertanggung jawab untuk ambil peran dalam permasalahan toleransi, ditambah dengan sekolah dasar Islam yang menerapkan konsep pendidikan Islam yang pluralis-multikultural. Dibutuhkan adanya penelitian untuk mengetahui bagaimana hal ini terjadi sehingga menghasilkan jawaban secara deskriptif hal-hal seputar pembinaan perilaku toleransi dan kondisi di sekolah.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti akan meneliti lebih dalam secara deskriptif kualitatif dengan mengambil judul “STRATEGI PEMBINAAN PERILAKU TOLERANSI SISWA DI SEKOLAH DASAR ISLAM” sebagai pemecahan masalah untuk mendeskripsikan mengenai strategi sekolah dasar Islam terhadap pembinaan perilaku toleransi siswa sebagai dasar pengembangan pembinaan perilaku toleransi.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana gambaran umum sekolah dasar Islam Ibnu Sina?
2. Bagaimana pelaksanaan pembinaan perilaku toleransi siswa di sekolah dasar Islam Ibnu Sina?
3. Bagaimana tujuan dari pembinaan perilaku toleransi siswa di sekolah dasar Islam Ibnu Sina?

4. Bagaimana hambatan dan solusi dalam proses pembinaan perilaku toleransi siswa yang dihadapi oleh guru di sekolah dasar Islam Ibnu Sina?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Menganalisis dan mendeskripsikan gambaran umum sekolah dasar Islam Ibnu Sina.
2. Menganalisis dan mendeskripsikan pelaksanaan pembinaan perilaku toleransi siswa di sekolah dasar Islam Ibnu Sina.
3. Menganalisis dan mendeskripsikan tujuan dari pembinaan perilaku toleransi siswa di sekolah dasar Islam Ibnu Sina.
4. Menganalisis dan mendeskripsikan hambatan dan solusi dalam proses pembinaan perilaku toleransi siswa yang dihadapi oleh guru di sekolah dasar Islam Ibnu Sina.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap pemikiran dan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan strategi pembinaan perilaku toleransi siswa di sekolah. Sehingga dapat menjadi bahan pengembangan pembinaan perilaku toleransi dalam lingkup pendidikan kewarganegaraan bagi siswa sekolah dasar.

2. Manfaat Praktis

Bagi Sekolah, hasil penelitian ini dapat memberikan deskripsi umum mengenai strategi pembinaan perilaku toleransi siswa di sekolah sehingga dapat menjadi pengembangan kualitas pendidikan terutama yang berkaitan dengan pembinaan perilaku toleransi.

Bagi Guru, penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk dijadikan refleksi terhadap strategi pembinaan perilaku toleransi dan pengembangan pembelajaran yang berkaitan dengan perilaku toleransi.

Bagi Peneliti, menambah pengetahuan dan wawasan mengenai strategi pembinaan perilaku toleransi siswa di sekolah dasar.

Bagi Peneliti Selanjutnya, hasil penelitian ini dapat berguna dan bermanfaat untuk melakukan riset lebih lanjut dan lebih mendalam mengenai strategi pembinaan perilaku toleransi siswa di sekolah dasar.

3. Manfaat Aksi Sosial

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dalam menyajikan pembinaan perilaku toleransi melalui kajian strategi pembinaan perilaku toleransi.

1.5 Struktur Organisasi Skripsi

Gambaran mengenai keseluruhan isi skripsi dan pembahasannya dapat dijelaskan dalam sistematika sebagai berikut.

BAB I Pendahuluan. Bab ini berisikan latar belakang dilakukannya penelitian yang berjudul Strategi Pembinaan Perilaku Toleransi Siswa di Sekolah Dasar Islam. Perumusan masalah penelitian yang telah teridentifikasi oleh peneliti, tujuan penelitian yang hendak di lakukan oleh peneliti, manfaat penelitian serta struktur organisasi skripsi seluruhnya dituangkan dalam bentuk tulisan dan deskripsi.

BAB II Kajian Pustaka. Bab ini berisi kajian teoritis yang berisikan teori-teori yang membahas variabel-variabel dalam penelitian ini.

BAB III Metode Penelitian. Bab ini berisi tentang model penelitian dan desain penelitian yang dilakukan oleh peneliti, partisipan, dan tempat penelitian, serta analisis data yang digunakan untuk menganalisis hasil data yang diperoleh.

BAB IV Temuan dan Pembahasan. **BAB** ini berisi mengenai pencapaian temuan penelitian berdasarkan hasil pengolahan data dan analisis data serta pembahasan temuan penelitian untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah penelitian yang telah di susun.

BAB V Simpulan, Implikasi dan Rekomendasi. Bab ini berisi mengenai simpulan, implikasi, dan rekomendasi.